



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI**

### **TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sehingga atas perkenan Nya penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi untuk masa waktu 1 (Satu) tahun kedepan dapat terselesaikan.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan majunya masyarakat Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan khususnyadalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik guna menunjang kemajuan pembangunan di Kota Cimahi sesuai visi misi Kota Cimahi. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi memiliki peran yang strategis sebagai rujukan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dituntut kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya Rencana Kerja ini, semoga mendapat Rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                    | I  |
| Daftar isi.....                                                                                                         | II |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                          | 1  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                               | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                               | 2  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                            | 3  |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                        | 3  |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS</b><br><b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI</b> .....           | 5  |
| 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2021) dan<br>perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022) ..... | 5  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....                                                                              | 15 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....                                                         | 19 |
| 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                                           | 22 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                                            | 23 |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....                                                              | 24 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                          | 24 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....                                                                                | 25 |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                                                         | 26 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                                                                             | 27 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dengan diberlakukannya peraturan Daerah tersebut yang awalnya Dinas Komunikasi, Informatika, Kerasipan dan Perputakaan Kota Cimahi berubah menjadi dua dinas yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Arsip Daerah. Dalam Pasal 6 ayat 2 huruf p disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan perubahan tersebut maka harus disusun rencana kerja sebagai landasan pelaksanaan bagi program dan kegiatan yang dilaksana oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Dengan disusunnya rencana kerja ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian

visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
- b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- c) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- e) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- f) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j) Kepres No. 50 tahun 1997 tentang Pedoman Umum Perpustakaan
- k) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah;
- n) Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 44 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Perpustakaan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan dokumen dasar bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah merencanakan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai tahapan untuk mencapai target akhir Renstra untuk Mewujudkan Cimahi Kota Cerdas (Creative, Egalitarian, Religious, Developable, Accretive dan Sustainable).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi tahun 2023 sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.5. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.3. Maksud dan Tujuan,**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

## **BAB IV     PENUTUP**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA KOTA CIMAHI**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2021) dan**  
**perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022)**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2021)**

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Komuikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026, pagu anggaran Belanja yang diharapkan untuk kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 18.908.171.673,00. Perbandingan Anggaran belanja berdasarkan Rencana Strategis dengan DPA Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

| URAIAN                                             | Jumlah (Rp.)      | Prosentase (%) |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Pagu Anggaran Belanja Rencana Strategis Tahun 2021 | 21.974.133.011,00 |                |
| Pagu Anggaran Belanja DPA Tahun 2021               | 18.908.171.673,00 | 86,05%         |

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2021

| No  | Sasaran Strategis                                                               | Indikator Kinerja                                                                  | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                                             | (3)                                                                                | (4)    | (5)       | (6)     |
| 1   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi | Nilai SAKIP Dinas                                                                  | BB     | BB        | 100%    |
| 2   | Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik                | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)                              | 3,18   | 2,75%     | 86%     |
| 3   | Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah                              | Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral | 80%    | 80%       | 100%    |

Capaian sasaran strategis meningkatkan akses membaca masyarakat dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mencapai capaian 100%.

Terdapat 3 urusan dan 1 non urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Pencapaian sasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Kota Cimahi per urusan sebagai berikut:

**a. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik**

Tabel 2.5. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2021, Bidang Komunikasi dan Informatika

| N<br>O | URUSAN/PROGRAM<br>/ KEGIATAN                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                   |               |                 |                    | ANGGARAN<br>(Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                           | URAIAN                                                                              | SATUA<br>N    | TARGE<br>T 2021 | REALISA<br>SI 2021 |                  |
|        | BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK                                                                                                         |                                                                                     |               |                 |                    |                  |
|        | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                         |                                                                                     |               |                 |                    |                  |
|        | Program<br>Pengelolaan<br>Aplikasi Informatika                                                                                                            | Cakupan<br>Pengembangan e-<br>Government<br>Daerah                                  | persen        | 50              | 91                 | 7.036.766.600    |
| 1      | Pengelolaan<br>Nama Domain Yang<br>Telah<br>Ditetapkan Oleh<br>Pemerintah Pusat<br>Dan<br>Sub Domain Di<br>Lingkup<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Prosentase<br>perangkat<br>daerah yang<br>menggunakan<br>domain<br>cimahikota.go.id | persen        | 86              | 96,85              | 1.433.895.500    |
| 2      | Pengelolaan E-<br>government Di<br>Lingkup Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                         | Prosentase<br>cakupan<br>layanan TIK;                                               | persen        | 50              | 91                 | 5.602.871.100    |
|        | Program Informasi<br>dan<br>Komunikasi Publik                                                                                                             | Cakupan layanan<br>informasi<br>pemerintahan<br>daerah                              | persen        | 60              | 60                 | 2.512.031.800    |
| 1      | Kegiatan Pengelolaan<br>Informasi Dan<br>Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                         | Persentase<br>analisis berita<br>yang berkonten<br>positif                          | persen        | 80              | 82,5               | 2.512.031.800    |
|        | URUSAN STATISTIK                                                                                                                                          |                                                                                     |               |                 |                    |                  |
|        | Program<br>Penyelenggaraan<br>Statistik<br>Sektoral                                                                                                       | Persentase<br>ketersediaan<br>data statistik<br>daerah                              | persen        | 65              | 71,42              | 258.061.400      |
| 1      | Penyelenggaraan<br>Statistik Sektoral Di<br>Lingkup                                                                                                       | Jumlah publikasi<br>Data<br>Statistik Kota                                          | publik<br>asi | 2               | 2                  | 258.061.400      |

| N<br>O | URUSAN/PROGRAM<br>/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                            |             |                 |                    | ANGGARAN<br>(Rp) |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
|        |                              | URAIAN                                                       | SATUA<br>N  | TARGE<br>T 2021 | REALISA<br>SI 2021 |                  |
|        | Daerah<br>Kabupaten/Kota     | Cimahi;                                                      |             |                 |                    |                  |
|        |                              | Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi; | datase<br>t | 200             | 200                |                  |

**b. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian**

Tabel 2.6. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2021, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian

| N<br>O | URUSAN/PROGRAM<br>/ KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                         |            |                 |                       | ANGGARAN    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|        |                                                                                        | URAIAN                                                                                                                                                                                    | SATUA<br>N | TARGE<br>T 2021 | REALI<br>SASI<br>2021 |             |
|        | BIDANG PERSANDIAN                                                                      |                                                                                                                                                                                           |            |                 |                       |             |
|        | URUSAN PERSANDIAN                                                                      |                                                                                                                                                                                           |            |                 |                       |             |
|        | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                          | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah                                                                        | persen     | 3               | 100                   | 100.438.200 |
| 1      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi; | persen     | 50              | 51,3                  | 42.138.200  |
| 2      | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan                                  | persen     | 25              | 100                   | 58.300.000  |

**c. Urusan Penunjang**

Tabel 2.8. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2021, Urusan Penunjang

| N<br>O   | URUSAN/PROGRAM<br>/ KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                           |               |                    |                        | ANGGARAN      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                                        | URAIAN                                                                      | SATUAN        | TARG<br>ET<br>2020 | REALI-<br>SASI<br>2020 |               |
|          | URUSAN<br>PENDUKUNG<br>PEMERINTAHAN                                                    |                                                                             |               |                    |                        |               |
| <b>A</b> | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Nilai LAKIP</b>                                                          |               | <b>75,65</b>       | <b>75,65</b>           | 8.357.436.237 |
| <b>1</b> | Perencanaan<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah               | Prosentase<br>dokumen<br>perencanaan dan<br>evaluasi yang<br>disusun        | <b>persen</b> | <b>100</b>         | <b>100</b>             | 15.020.000    |
| <b>2</b> | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                           | Pesentase<br>penyelenggaraan<br>administrasi<br>barang milik<br>daerah      | <b>persen</b> | <b>75</b>          | <b>75</b>              | 23.012.000    |
| 3        | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                               | Prosentase<br>penyediaan<br>administrasi umum                               | Persen        | 50                 | 100                    | 294.680.420   |
| 4        | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                          | Prosentase<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan<br>daerah | persen        | 50                 | 50                     | 90.038.100    |
| 5        | Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah      | Prosentase<br>pemeliharaan<br>barang milik<br>daerah                        | persen        | 50                 | 50                     | 144.869.100   |
| 6        | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                        | Jumlah Pegawai<br>Yang<br>terfasilitasi<br>pembinaan                        | pegawai       | 48                 | 43                     | 2.800.000     |
| 7        | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                           | Prosentase<br>administrasi<br>keuangan<br>terlaksana                        | persen        | 100                | 100                    | 7.787.016.617 |
|          |                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Keuangan<br>Yang Disusun;                                 | dokumen       | 21                 | 21                     |               |

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.9. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021

| NO. | URAIAN                                | JUMLAH (Rp.)   |
|-----|---------------------------------------|----------------|
| 1   | Pagu Anggaran Tahun 2021              | 18.264.734.237 |
| 2   | Realisasi Anggaran s.d. Desember 2021 | 17.244.672.161 |
| 3   | Persentase realisasi anggaran         | 91,20%         |

Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.10. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021

| N<br>O    | URUSAN/PROGRAM /<br>KEGIATAN                                                                                                   | ANGGARAN      | REALISASI     | CAPAIAN<br>PENYERAPAN<br>ANGGARAN (%) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK</b>                                                                       |               |               |                                       |
| <b>I</b>  | <b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                       |               |               |                                       |
| <b>a</b>  | <b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>                                                                                | 7.036.766.600 | 6.070.058.257 | 86,26%                                |
| <b>1</b>  | Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.433.895.500 | 1.422.705.661 | 99,22%                                |
| <b>2</b>  | Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 5.602.871.100 | 4.647.352.596 | 82,95%                                |
| <b>b</b>  | <b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>                                                                                 | 2.512.031.800 | 2.148.646.459 | 85,53%                                |
| <b>1</b>  | Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | 2.512.031.800 | 2.148.646.459 | 85,53%                                |
| <b>II</b> | <b>URUSAN STATISTIK</b>                                                                                                        |               |               |                                       |
| <b>a</b>  | <b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>                                                                              | 258.061.400   | 230.043.194   | 89,14%                                |
| <b>1</b>  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                            | 258.061.400   | 230.043.194   | 89,14%                                |
| <b>B</b>  | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT &amp; PERSANDIAN</b>                                                                    |               |               |                                       |
| <b>II</b> | <b>URUSAN PERSANDIAN</b>                                                                                                       |               |               |                                       |
| <b>a</b>  | <b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>                                                           | 100.438.200   | 89.159.550    | 88,77%                                |
| <b>1</b>  | Penetapan Pola Hubungan                                                                                                        | 42.138.200    | 33.633.250    | 79,82%                                |

| <b>N<br/>O</b>        | <b>URUSAN/PROGRAM /<br/>KEGIATAN</b>                                                            | <b>ANGGARAN</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN<br/>PENYERAPAN<br/>ANGGARAN (%)</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|
|                       | Komunikasi Sandi Antar<br>Perangkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                    |                 |                  |                                                |
| 2                     | Penyelenggaraan Persandian<br>Untuk Pengamanan Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | 58.300.000      | 55.526.300       | 95,24%                                         |
| <b>IV SEKRETARIAT</b> |                                                                                                 |                 |                  |                                                |
| <b>a</b>              | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                      | 8.357.436.237   | 8.193.767.017    | 98,04%                                         |
| <b>1</b>              | Perencanaan Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                           | 15.020.000      | 15.010.000       | 99,93%                                         |
| <b>2</b>              | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah                                       | 23.012.000      | 21.336.290       | 92,72%                                         |
| 3                     | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                           | 294.680.420     | 292.410.376      | 99,23%                                         |
| 4                     | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                         | 90.038.100      | 82.536.997       | 91,67%                                         |
| 5                     | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 144.869.100     | 140.340.500      | 96,87%                                         |
| 6                     | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                    | 2.800.000       | 2.800.000        | 100,00%                                        |
| 7                     | Administrasi Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                    | 7.787.016.617   | 7.639.332.854    | 98,10%                                         |

**B. Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022)**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                  |                                               | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan       | Tahun 2022             |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                            |                                  |                                               |                                                        | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) | (2)                                                                        | (3)                              | (4)                                           | (5)                                                    | (6)                    | (6)            |
|     |                                                                            | Dinas Komunikasi dan Informatika |                                               |                                                        |                        | 13.493.034.317 |
|     | I                                                                          | Urusan                           | PENDUKUNG PEMERINTAHAN                        | Nilai SAKIP                                            |                        |                |
|     | I.1                                                                        | Program                          | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH           | Nilai LAKIP                                            | 85 indeks              | 8.294.738.317  |
| A   | I.1.1                                                                      | Kegiatan                         | Administrasi Keuangan                         | Prosentase administrasi keuangan terlaksana            | 100 persen             | 7.683.481.617  |
|     |                                                                            |                                  |                                               | Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;                  | 21 Dokumen             |                |
| 1   | I.1.1.2                                                                    | Sub Kegiatan                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan;      | 48 Pegawai             | 7.635.966.617  |
|     |                                                                            | Sub Kegiatan                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN dan non ASN yang terfasilitasi administrasi | 61 pegawai             |                |

| No. |          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                               | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                     | Tahun 2022             |                |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|     |          |                                                                            |                                                                               |                                                                      | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) |          | (2)                                                                        | (3)                                                                           | (4)                                                                  | (5)                    | (6)            |
|     |          | Sub Kegiatan                                                               | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan                   | 12 bulan               | 47.515.000     |
|     |          | Sub Kegiatan                                                               | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah bulan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi                    | 12 bulan               |                |
| 3   | I.1.1.4  | Sub Kegiatan                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun;                         | 1 dokumen              |                |
|     |          | Sub Kegiatan                                                               | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan                                 | 2 dokumen              |                |
| 2   | I.1.1.3  | Sub Kegiatan                                                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran            | 17 dokumen             |                |
|     |          | Sub Kegiatan                                                               | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Laporan prognosis                                     | 1 Dokumen              |                |
| B   | I.1.2    | Kegiatan                                                                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah          | 75 persen              | 27.222.000     |
|     |          |                                                                            |                                                                               | Jumlah penambahan barang yang diadministrasikan                      |                        |                |
|     |          | Sub Kegiatan                                                               | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pengamanan                 | 6 unit                 | 27.222.000     |
| B   | I.1.2    | Kegiatan                                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Prosentase penyediaan administrasi umum                              | 50 persen              | 325.356.500    |
|     |          |                                                                            |                                                                               | Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;                            | 12 Bulan               |                |
| 14  | I.1.2.11 | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor;                             | 12 Bulan               | 26.230.200     |
| 15  | I.1.2.12 | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan;                     | 12 Bulan               | 11.964.300     |
| 23  | I.1.2.20 | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;                        | 2 Set                  | 32.137.000     |
| 25  | I.1.2.22 | Sub Kegiatan                                                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi         | 76 aktivitas           | 255.025.000    |
|     |          | Kegiatan                                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah      | 50 persen              | 100.868.100    |
|     |          |                                                                            |                                                                               | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah    | 12 bulan               |                |
|     | I.1.2.17 | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat                           | 12 Bulan;              | 39.660.000     |
|     | I.1.2.15 | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan;              | 13.970.000     |

| No.       |              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                     | Tahun 2022             |                      |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|           |              |                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif       |
| (1)       |              | (2)                                                                        | (3)                                                                                                              | (4)                                                                                  | (5)                    | (6)                  |
|           | I.1.2.14     | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah bulan penyediaan kebutuhan perlengkapan kebersihan dan jasa tenaga kebersihan | 12 bulan               |                      |
|           |              |                                                                            |                                                                                                                  | <b>jumlah bulan penyediaan umum kantor</b>                                           | <b>12 bulan</b>        | 47.238.100           |
|           |              | <b>Kegiatan</b>                                                            | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Prosentase pemeliharaan barang milik daerah</b>                                   | <b>50 persen</b>       | <b>130.490.100</b>   |
|           |              |                                                                            |                                                                                                                  | Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah                                        | 12 bulan               |                      |
|           |              | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan         | 6 unit                 | 62.154.100           |
|           |              | Sub Kegiatan                                                               | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                   | Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya                         |                        | 46.836.000           |
|           |              | Sub Kegiatan                                                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan                              | 19 unit                | 21.500.000           |
| <b>C</b>  | I.1.3        | <b>Kegiatan</b>                                                            | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                 | <b>Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan</b>                                   | <b>48 Pegawai;</b>     | <b>4.200.000</b>     |
| <b>31</b> | I.1.3.6      | Sub Kegiatan                                                               | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                         | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi                                            | 48 Pegawai;            | 4.200.000            |
| <b>D</b>  | <b>I.1.4</b> | <b>Kegiatan</b>                                                            | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun</b>                      | <b>100 persen</b>      | <b>23.120.000</b>    |
|           |              |                                                                            |                                                                                                                  | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;</b>                            | <b>12 Dokumen;</b>     |                      |
|           |              |                                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan PD                                                        | 2 dokumen              | 13.120.000           |
|           |              |                                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD                                                              | 1 kali                 |                      |
|           |              |                                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | 1 kali                 |                      |
|           |              |                                                                            | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD                                                              | 1 kali                 |                      |
|           |              |                                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                    | 1 kali                 |                      |
|           |              |                                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 17 dokumen             |                      |
|           |              |                                                                            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD                                                   | 2 dokumen              | 10.000.000           |
|           | III          | <b>Urusan</b>                                                              | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                |                                                                                      |                        | <b>4.304.014.600</b> |

| No.       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Tahun 2022             |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|           |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif       |
| (1)       | (2)                                                                        | (3)                                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                              | (5)                    | (6)                  |
| III.1     | Program                                                                    | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                                   | <b>Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;</b>                                                                                                                                                 | <b>50 Persen;</b>      | <b>1.635.040.000</b> |
| III.1.1   | Kegiatan                                                                   | <b>Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>Prosentase cakupan layanan TIK;</b>                                                                                                                                                           | <b>50 Persen;</b>      | <b>401.050.000</b>   |
| III.1.1.1 | Sub Kegiatan                                                               | Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi                                        | Jumlah dokumen kebijakan TIK;                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen;             |                      |
| III.1.1.2 | Sub Kegiatan                                                               | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                                                            | Level Pengoperasian Pusat Data;                                                                                                                                                                  | 2 Level;               | 166.000.000          |
| III.1.1.4 | Sub Kegiatan                                                               | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                                                                  | Prosentase aplikasi yang dikelola                                                                                                                                                                | 80 Persen              | 190.500.000          |
|           | Sub Kegiatan                                                               | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                                                          | Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas                                                                                                                                                        | 3 aktivitas            | 44.550.000           |
|           |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |
| III.1.2   | Kegiatan                                                                   | <b>Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id</b>                                                                                                                      | <b>86 Persen</b>       | <b>1.233.990.000</b> |
| III.1.2.1 | Sub Kegiatan                                                               | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                               | Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK                                                                                                                                            | 86 Persen              | 1.233.990.000        |
| III.2     |                                                                            | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                                        | <b>Cakupan Layanan Informasi dan komunikasi Pembangunan Daerah</b>                                                                                                                               | <b>60 Persen</b>       | <b>2.668.974.600</b> |
| III.2.1   | Kegiatan                                                                   | <b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                   | <b>Prosentase layanan informasi dan komunikasi yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                          | <b>80 persen</b>       | <b>2.668.974.600</b> |
|           |                                                                            |                                                                                                                                       | <b>Prosentase permohonan informasi yang dipenuhi</b>                                                                                                                                             | <b>100 persen</b>      |                      |
| III.2.1.1 | Sub Kegiatan                                                               | Layanan Hubungan Media                                                                                                                | Jumlah publikasi pemerintahan                                                                                                                                                                    | 4910 publikasi         | 2.223.970.000        |
| III.2.1.2 | Sub Kegiatan                                                               | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                            | Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                        | 50 persen              | 145.800.000          |
| III.2.1.3 | Sub Kegiatan                                                               | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                   | prosentase analisis berita                                                                                                                                                                       | 50 persen              | 299.204.600          |
|           |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                        |                      |
| V         | Urusan                                                                     | <b>PERSANDIAN</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                        | <b>100.438.200</b>   |
| V.1       |                                                                            | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                                                  | <b>Persentase Informasi Yang Aman</b>                                                                                                                                                            | <b>3 Persen</b>        | <b>100.438.200</b>   |
| V.1.1     | Kegiatan                                                                   | <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                 | <b>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;</b> | <b>50 Persen</b>       | <b>42.138.200</b>    |

| No. |          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                          | Tahun 2022             |                |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|     |          |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                           | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| (1) |          | (2)                                                                        | (3)                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                       | (5)                    | (6)            |
|     | V.1.1.1  | Sub Kegiatan                                                               | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi                                                                                                                 | 8 Perangkat Daerah     | 42.138.200     |
|     | V.1.2    | Kegiatan                                                                   | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                         | Prosentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMKI                                                       | 25 Persen              | 58.300.000     |
|     |          |                                                                            |                                                                                                                | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan; | 50 persen              |                |
|     | V.1.2.1  | Sub Kegiatan                                                               | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian                                                                    | 7 Perangkat Daerah     | 30.800.000     |
|     | V.1.2.2  | Sub Kegiatan                                                               | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah layanan kemanan informasi yang dilakukan                                                                                                           | 4 Layanan              | 27.500.000     |
|     |          |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                        |                |
|     | VI       | Urusan                                                                     | STATISTIK                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                        | 266.028.800    |
|     | VI.1     |                                                                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                     | Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah;                                                                                                            | 65 Persen;             | 266.028.800    |
|     |          |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                        |                |
|     | VI.1.1   | Kegiatan                                                                   | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;                                                                                                              | 2 PUBLIKASI;           | 266.028.800    |
|     |          |                                                                            |                                                                                                                | Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi;                                                                                              | 200 dataset            |                |
|     | VI.1.1.1 | Sub Kegiatan                                                               | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral           | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja                                                                   | 2 kali                 | 266.028.800    |
|     | VI.1.1.2 | Sub Kegiatan                                                               | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi                      | Jumlah SDM pengelola data/statistik/informasi;                                                                                                            | 60 Orang;              |                |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan 3 urusan yang menjadi kewenangan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

a. Layanan Publik Secara Langsung

Terdiri dari: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Informasi, Layanan Publikasi

b. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

Terdiri dari : Layanan Data Statistik, Layanan Publikasi, Layanan Dokumentasi, Layanan Aplikasi TIK, Layanan Infrastruktur Jaringan TIK, Layanan Persandian.

Kinerja masing-masing layanan tersebut didukung oleh beberapa aspek kinerja, sehingga untuk mengevaluasi kinerja layanan tersebut dilakukan analisa terhadap capaian indikator masing-masing aspeknya. Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Layanan Publik Secara Langsung

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi PESDUK (Pesan Penduduk), layanan surat baik elektronik maupun fisik, pengaduan langsung dan pengaduan melalui media massa. Secara umum layanan Pengaduan Masyarakat cukup baik karena hampir semua pengaduan selalu direspon oleh pengelola. Namun kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah pada tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu tidak terkontrolnya penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu layanan Pengaduan Masyarakat belum terintegrasi dengan instansi/lembaga Pemerintah instansi vertikal antara lain kepolisian, BPN, Kementerian Agama, BPS.

b. Layanan Informasi

Layanan Informasi, secara fisik telah mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya renovasi loket pelayanan. Layanan ini didukung oleh Tim PPID Kota Cimahi yang terdiri dari PPID Utama yaitu Kepala Bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah:

1. Belum adanya SOP untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada PPID Kota Cimahi
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah.
3. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Cimahi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
4. Informasi pada website Pemerintah Kota Cimahi kurang *ter-update*

c. Layanan Publikasi

Layanan Publikasi dilaksanakan melalui media sosial dan kerjasama dengan media massa. Layanan publikasi melalui media sosial terdapat 2 yaitu Facebook dan Instagram. Publikasi melalui media sosial meliputi publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, capaian-capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta program-program prioritas. Sedangkan publikasi melalui media massa meliputi berbagai media koran/majalah, media *online*, media radio dan media televisi. Publikasi melalui media massa meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi. *Pers release* dilakukan untuk program-program prioritas Pemerintah Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi dalam layanan publikasi, sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media sosial mempunyai kecenderungan terfokus pada aktivitas Kepala Daerah dan kurang didukung oleh narasi tentang pembangunan.
2. Publikasi melalui media sosial kurang mendapat respon dari masyarakat karena kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah yaitu respon dari masyarakat tidak diberikan tanggapan karena tidak didukung dengan tim melainkan hanya dilaksanakan oleh operator.
3. Tidak ada *feedback* dari analisis berita yang dilakukan sebagai bahan penyusunan perencanaan publikasi.

## B. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

### a. Layanan Data Statistik

Untuk Layanan Data Statistik, pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi OPEN DATA sebagai sarana publikasi data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam layanan Data Statistik adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral antara “Bappeda dengan Diskominfo;
2. Pengelola Data pada PD dibebani pekerjaan pengumpulan data dari berbagai instansi (Bappeda, Setda, Kominfo, Instansi Vertikal) sehingga tidak fokus;
3. Pemahaman tentang statistik sektoral masih rendah dan masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistik, kemampuan analisis dan grafis;
4. Penggunaan *Platform* yang berbeda pada aplikasi yang dibangun perangkat daerah sehingga menghambat proses integrasi.

### b. Layanan Dokumentasi

Layanan Dokumentasi dilakukan hanya kegiatan pimpinan kepala daerah.

c. Layanan Aplikasi TIK

Layanan Aplikasi TIK meliputi layanan domain dan subdomain, pengelolaan/kontrol aplikasi-aplikasi PD, pendampingan pembangunan aplikasi PD dan integrasi aplikasi-aplikasi PD.

d. Layanan Infrastruktur Jaringan TIK

Seluruh Perangkat Daerah di lingkup perkantoran Pemkot Cimahi telah tersambung dengan sambungan intranet. Sedangkan yang di luar lingkup perkantoran Pemkot Cimahi menggunakan jaringan *Fiber Optic*. Belum seluruhnya kantor layanan tersambung dengan *fiber optic* melainkan menggunakan saluran VPN. Kendala dalam layanan infrastruktur jaringan TIK yaitu:

1. Pusat Data/Data Centre belum memadai dan bercampur dengan ruang kerja administrasi.
2. Penggelaran Jaringan *Fiber Optic* belum menyeluruh sesuai dengan perencanaan.
3. Implementasi dan Optimalisasi Jaringan CCTV untuk kepentingan implementasi *Smart City* belum dilakukan.
4. Belum lengkapnya perangkat pendukung kinerja jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta perangkat pengamanan jaringan di dalamnya.
5. Adanya ancaman akan keamanan jaringan yang terus meningkat yang harus segera diantisipasi segera.
6. Belum tersediannya kebijakan, standard dan prosedur.

e. Layanan Persandian

Layanan persandian meliputi layanan keamanan informasi, sertifikasi elektronik dan layanan persandian. Kendala yang dihadapi dalam layanan persandian adalah:

1. Kategori Sistem Elektronik tinggi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi membutuhkan minimal tingkat kematangan tata kelola yang Terdefinisi dan Konsisten (tingkat III) dengan kelengkapan control keamanan yang cukup lengkap. Mengacu pada hasil penilaian mandiri

- dengan menggunakan instrument Indeks KAMI, tingkat kematangan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi baru ditingkat Penerapan Kerangka Kerja Dasar (tingkat II) dengan kelengkapan kontrol keamanan yang perlu perbaiki
2. Belum adanya dokumen perencanaan strategis persandian dan keamanan informasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan program/kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi
  3. Belum ada proses penilaian kinerja keamanan informasi untuk mengukur tingkat ketercapaiannya terhadap sasaran keamanan informasi
  4. Kebijakan tata kelola keamanan informasi sudah ada, namun masih belum disesuaikan dengan regulasi maupun standar yang terbaru
  5. SOP keamanan informasi yang ada saat ini belum memenuhi semua kebutuhan organisasi, dan masih mengacu pada regulasi maupun standar lama
  6. Kurang optimalnya layanan persandian dan keamanan informasi karena belum tersediaannya sarana dan prasarana pendukung
  7. *Security*, Keamanan Aplikasi yang telah dibangun, Keamanan Akses Jaringan Internet maupun Intranet dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi disetiap SKPD;

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu penting terkait urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut:

#### **a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

b. Portal Satu Data Indonesia

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

c. *Command Centre*

Dalam rangka “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” Provinsi Jawa Barat akan membangun *Command Centre* untuk seluruh Kota/Kabupaten Jawa Barat dalam waktu 5 tahun, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Pemberian bantuan diberikan secara bertahap tergantung pada kesiapan Kota/Kabupaten. *Command Center (Smart Digital Government Di Kabupaten/Kota)*, akan berfungsi sebagai sarana Monitoring Kinerja Perangkat daerah, *Monitoring* Laporan Lapangan secara *real time*, Penyajian Informasi Eksekutif, *Video Conference*, dan Presentasi.

d. Pembangunan Mall Pelayanan Publik

## 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2021 menyatakan bahwa tema pembangunan Tahun 2021 adalah

**“Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan didukung Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.**

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021:

- Prioritas 1 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- Prioritas 2 : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- Prioritas 3 : Peningkatan Penanganan PMKS
- Prioritas 4 : Peningkatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi
- Prioritas 5 : Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019
- Prioritas 6 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- Prioritas 7 : Peningkatan Produktivitas Pelaku Ekonomi Rakyat
- Prioritas 8 : Peningkatan RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Prioritas 9 : Penanganan Banjir dan peningkatan kesiapsiagaan tanggap bencana
- Prioritas 10 : Penataan Kawasan Kumuh

Prioritas 11 : Pengembangan Jaringan Jalan dan Manajemen Transportasi

Sesuai dengan tugas dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menjadi bagian dari upaya mendukung prioritas 4 yaitu peningkatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yakni melalui layanan pengaduan masyarakat, layanan informasi, publikasi pembangunan dan pemerintahan, layanan penyelenggaraan elektronik *government* dan layanan pengelolaan data statistik.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kota Cimahi Tahun 2021, secara umum masyarakat Kota Cimahi mengharapkan pelatihan TIK. Sedangkan dari hasil Forum Perangkat Daerah yang melibatkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan-urusan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi bahwa masyarakat Kota Cimahi pada hakekatnya mengharapkan peningkatan kinerja semua urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Infrastruktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

#### **Arahan Pembangunan**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

- Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Visi, Misi dan Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang mengarah pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Misi, tujuan, sasaran dan target indikator utama (IKU) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah:

Tabel 3.1. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

| No. | Misi Kota Cimahi                              | Tujuan                                                                  | Sasaran                                                                 | Indikator Kinerja Utama (IKU)                         |        |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|     |                                               |                                                                         |                                                                         | Uraian                                                | Target |
| I   | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik               | Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik               | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3.00   |
|     |                                               | Meningkatkan penyelenggaraa n implementasi keterbukaan informasi publik | Meningkatnya penyelenggaraa n implementasi keterbukaan informasi publik | Indeks Keterbukaan Infromasi Publik                   | 80%    |
|     |                                               | Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang                          | Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang                         | Indeks Pembanguna n Statistik                         | 2.00   |

| No. | Misi Kota Cimahi | Tujuan                                                   | Sasaran                                                  | Indikator Kinerja Utama (IKU)    |        |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|     |                  |                                                          |                                                          | Uraian                           | Target |
|     |                  | berkualitas                                              | berkualitas                                              |                                  |        |
|     |                  | Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah | Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | 351    |

**3.3. Program dan Kegiatan**

Pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, rencana kerja Dinas Komunkasi dan Informatika Tahun 2023 terdiri dari terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 Berdasarkan Rencana Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

| Kode |    |  |  |  | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                    | Satuan      | Target | Pagu Indikatif |
|------|----|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 1    |    |  |  |  | 2                                                                 | 3                                               |                                                    | 4           | 5      | 6              |
|      |    |  |  |  |                                                                   |                                                 |                                                    |             |        |                |
|      |    |  |  |  |                                                                   |                                                 |                                                    |             |        |                |
| 2    | 10 |  |  |  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  |                                                 |                                                    |             |        | 13.247.214.000 |
| 2    |    |  |  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       |                                                 | Nilai Sakip Pemerintah Daerah                      | Nilai Angka | 71     | 6.964.092.800  |
|      |    |  |  |  |                                                                   |                                                 | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi | Persen      | 50     |                |
|      |    |  |  |  |                                                                   |                                                 | Nilai IKM Perangkat Daerah                         | Nilai Angka | 76,61  |                |
|      |    |  |  |  |                                                                   |                                                 |                                                    |             |        |                |

| Kode |   |   |   |   | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                     | Satuan       | Target    | Pagu Indikatif       |
|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 1    |   |   |   |   | 2                                                                             | 3                                               |                                                                     | 4            | 5         | 6                    |
|      |   |   |   |   | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>                                         |                                                 | <b>Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;</b>                        | dokumen      | 12        | <b>6.406.787.800</b> |
|      |   |   |   |   |                                                                               |                                                 |                                                                     |              |           |                      |
|      |   |   |   |   | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | Orang        | 34        | 6.364.092.800        |
|      |   |   |   |   | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen      | 18        | 42.695.000           |
|      |   |   |   |   |                                                                               |                                                 |                                                                     |              |           |                      |
| -    | - | - | - | - | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>        | -                                               | <b>Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah</b>                  | <b>Bulan</b> | <b>12</b> | <b>17.400.000</b>    |
|      |   |   |   |   |                                                                               |                                                 |                                                                     |              |           |                      |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | -                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                  | Dokumen      | 5         | 17.400.000           |
| -    | - | - | - | - |                                                                               | -                                               |                                                                     |              | -         |                      |

| Kode |   |   |   |   | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                           | Satuan  | Target | Pagu Indikatif     |
|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|
| 1    |   |   |   |   | 2                                                                       |                                                 | 3                                                                         | 4       | 5      | 6                  |
| -    | - | - | - | - | <b>Kegiatan Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                  | -                                               | (keluaran) Jumlah Bulan<br>Penyediaan Adminitrasi Umum;                   | bulan   | 12,00  | <b>236.116.000</b> |
| -    | - | - | - | - |                                                                         | -                                               |                                                                           |         |        |                    |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                        | -                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                     | Paket   | 40     | 22.596.400         |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan              | -                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang Disediakan              | Paket   | 15     | 15.459.000         |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor         | -                                               | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan      | Paket   | 3      | 23.111.600         |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | -                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | Laporan | 50     | 174.949.000        |
| -    | - | - | - | - |                                                                         | -                                               |                                                                           | -       | -      |                    |
| -    | - | - | - | - | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan</b>                    | -                                               | Jumlah bulan penyediaan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan             | bulan   | 12     | <b>91.079.000</b>  |

| Kode |   |   |   |   | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                        | Satuan  | Target | Pagu Indikatif     |
|------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|
| 1    |   |   |   |   | 2                                                                                     | 3                                               |                                                                                        | 4       | 5      | 6                  |
|      |   |   |   |   | <b>Pemerintahan Daerah</b>                                                            |                                                 | daerah                                                                                 |         |        |                    |
|      |   |   |   |   |                                                                                       |                                                 |                                                                                        |         |        |                    |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | -                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Laporan | 16     | 41.090.000         |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | -                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 16     | 3.800.000          |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | -                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 16     | 46.189.000         |
| -    | - | - | - | - |                                                                                       | -                                               |                                                                                        |         | -      |                    |
| -    | - | - | - | - | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | -                                               | Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah                                          | bulan   | 12     | <b>125.477.000</b> |

| Kode |   |   |   |   | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                        | Satuan | Target | Pagu Indikatif   |
|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| 1    |   |   |   |   | 2                                                                                                                             | 3                                               |                                                                                                        | 4      | 5      | 6                |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit   | 5      | 49.510.000       |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                   | -                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit   | 1      | 55.810.000       |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | -                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Unit   | 15     | 20.157.000       |
| -    | - | - | - | - | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                     | -                                               | <b>Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian</b>                        | Persen | 100    | <b>8.600.000</b> |

| Kode |   |   |   |   | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                             | Satuan  | Target | Pagu Indikatif |
|------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 1    |   |   |   |   | 2                                                                               | 3                                               |                                                                             | 4       | 5      | 6              |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                        | -                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan | Orang   | 40     | 8.600.000      |
|      |   |   |   |   |                                                                                 |                                                 |                                                                             |         |        |                |
|      |   |   |   |   |                                                                                 |                                                 |                                                                             |         |        |                |
| -    | - | - | - | - | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | -                                               | Prosentase dokumen<br>perencanaan dan evaluasi yang<br>disusun              | persen  | 100    | 78.633.000     |
|      |   |   |   |   |                                                                                 |                                                 |                                                                             |         |        |                |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah              | -                                               | Jumlah Dokumen perencanaan<br>perangkat daerah                              | Dokumen | 2      | 21.128.000     |
| -    | - | - | - | - | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                               | -                                               | Jumlah laporan evaluasi kinerja<br>perangkat daerah                         | Laporan | 16     | 57.505.000     |
| -    | - | - | - | - | -                                                                               | -                                               | -                                                                           | -       | -      |                |
|      |   |   |   |   | <b>BIDANG- BIDANG</b>                                                           |                                                 |                                                                             |         |        |                |
|      |   |   |   |   |                                                                                 |                                                 |                                                                             |         |        |                |

| Kode |    |    |      |    | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                   | Satuan  | Target | Pagu Indikatif |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                              | 3                                               |                                                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6              |
| 2    | 16 |    |      |    | URUSAN KOMINFO                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                   |         |        | 4.974.210.600  |
| 2    | 16 | 02 |      |    | Program Informasi dan<br>Komunikasi Publik                                                     |                                                 | Persentase Masyarakat Yang<br>Menjadi Sasaran Penyebaran<br>Informasi Publik, Mengetahui<br>Kebijakan Dan Program Prioritas<br>Pemerintah Dan Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota | Persen  | 60,00  | 2.107.129.800  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                   |         |        |                |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 |    | Kegiatan Pengelolaan Informasi<br>Dan Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                 | Prosentase analisis berita yang<br>berkonten positif                                                                                                                              | persen  | 82,00  | 2.107.129.800  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                   |         |        |                |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Sub Kegiatan Layanan<br>Hubungan Media                                                         |                                                 | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                                                                                     | Layanan | 10     | 1.743.265.000  |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Sub Kegiatan Pelayanan<br>Informasi Publik                                                     |                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan<br>Informasi Publik                                                                                                                                | Dokumen | 12     | 121.960.000    |

| Kode |    |    |      |    | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                        | Satuan          | Target | Pagu Indikatif |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                                    | 3                                               |                                                                                                                                        | 4               | 5      | 6              |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Media Komunikasi Publik                                                                  |                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Pengelolaan Media<br>Komunikasi Publik                                                             | Dokumen         | 12     | 241.904.800    |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                        |                 |        |                |
| 2    | 16 | 03 |      |    | Program Aplikasi Informatika                                                                                         |                                                 | Tingkat Kematangan Teknologi<br>Informasi dan Komunikasi (Nilai<br>Indeks)                                                             | Nilai<br>Indeks | 2.5    | 3.425.000.000  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                        |                 |        |                |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 |    | Kegiatan Pengelolaan E-<br>government Di Lingkup<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                              |                                                 | Persentase aplikasi yang<br>dikelola dan tersimpan di pusat<br>data Pemerintah Daerah                                                  | Persen          | 85     | 1.615.105.500  |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Penatalaksanaan<br>Dan Pengawasan E-government<br>Dalam Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah Provinsi |                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penatalaksanaan dan Pengawasan<br>E -Government dalam<br>Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen         | 1      | 357.400.000    |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Pusat Data Pemerintahan<br>Daerah                                                        |                                                 | Jumlah Pusat Data Pemerintahan<br>Daerah yang Dikelola                                                                                 | Unit            | 1      | 594.205.500    |

| Kode |    |    |      |    | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                      | Satuan        | Target    | Pagu Indikatif       |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                                                              | 3                                               |                                                                                                                                                      | 4             | 5         | 6                    |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                                                              |                                                 | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                              | Layanan       | 1         | 75.000.000           |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                                                      |                                                 | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City                                                            | Dokumen       | 1         | 150.000.000          |
|      |    |    |      |    | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                          |                                                 | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                                                 | Unit          | 1         | 438.500.000          |
| 2    | 16 | 03 | 2.01 |    | <b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                 | <b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b> | <b>persen</b> | <b>90</b> | <b>1.814.983.300</b> |
| 2    | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                           |                                                 | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                                       | Unit          | 75        | 1.814.983.300        |

| Kode |    |    |      |    | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                              | Satuan   | Target | Pagu Indikatif |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                                             | 3                                               |                                                                                                                              | 4        | 5      | 6              |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                              |          |        |                |
| 2    | 20 |    |      |    | URUSAN STATISTIK                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                              |          |        |                |
| 2    | 20 | 02 |      |    | Program Penyelenggaraan<br>Statistik Sektoral                                                                                 |                                                 | Persentase Perangkat Daerah<br>yang memiliki ketersediaan data<br>statistik sesuai dengan prinsip<br>satu data               | Persen   | 37     | 263.938.600    |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                              |          |        |                |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 |    | Kegiatan Penyelenggaraan<br>Statistik Sektoral Di Lingkup<br>Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                 | Jumlah ketersediaan data<br>statistik sektoral yang<br>memenuhi standar data                                                 | Data Set | 200    | 263.938.600    |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                              |          |        |                |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Dan<br>Sinkronisasi Pengumpulan,<br>Pengolahan, Analisis Dan<br>Diseminasi Data Statistik<br>Sektoral |                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pengumpulan,<br>Pengolahan, Analisis dan<br>Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen  | 20     | 236.750.000    |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Peningkatan<br>Kapasitas SDM Pemda Dalam<br>Peningkatan Mutu Statistik<br>Daerah Yang Terintegrasi               |                                                 | Jumlah SDM yang Meningkat<br>Kapasitasnya dalam Peningkatan<br>Mutu Statistik Daerah yang<br>Terintegrasi;                   | orang    | 45     | 27.188.600     |

| Kode |    |    |      |    | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                | Satuan              | Target | Pagu Indikatif |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                | 3                                               |                                                                                                                                                                                                                | 4                   | 5      | 6              |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                     |        |                |
| 2    | 21 |    |      |    | URUSAN PERSANDIAN                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                     |        |                |
| 2    | 21 | 02 |      |    | Program Penyelenggaraan<br>Persandian Untuk Pengamanan<br>Informasi                              |                                                 | Persentase Perangkat Daerah<br>yang menggunakan layanan<br>persandian dalam rangka<br>pengamanan informasi milik<br>pemerintah                                                                                 | Persen              | 33     | 481.964.000    |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                     |        |                |
| 2    | 21 | 02 | 2.02 |    | Kegiatan Penetapan Pola<br>Hubungan Komunikasi Sandi<br>Antar Perangkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                 | Persentase titik yang<br>diamankan dibanding dengan<br>jumlah seluruh titik Pola<br>Hubungan Komunikasi Sandi<br>(PHKS) yang diterapkan<br>pemerintah daerah berdasarkan<br>pola hubungan komunikasi<br>sandi; | persen              | 10     | 80.000.000     |
| 2    | 21 | 02 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Operasionalisasi<br>Jaring Komunikasi Sandi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Terhubung dalam Jaring<br>Komunikasi Sandi                                                                                                                                     | Perangkat<br>Daerah | 1      | 80.000.000     |

| Kode |    |    |      |    | Bidang Urusan Pemerintahan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                               | Satuan              | Target | Pagu Indikatif |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                                                       | 3                                               |                                                                                                                               | 4                   | 5      | 6              |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                               |                     |        |                |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                               |                     |        |                |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 |    | Kegiatan Penyelenggaraan<br>Persandian Untuk Pengamanan<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                |                                                 | Persentase ASN yang telah<br>menggunakan sertifikat<br>elektronik                                                             | persen              | 3      | 401.964.000    |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                               |                     |        |                |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan<br>Analisis Kebutuhan Dan<br>Pengelolaan Sumber Daya<br>Keamanan Informasi Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota |                                                 | Jumlah Laporan Analisis<br>Kebutuhan dan Pengelolaan<br>Sumber Daya Keamanan<br>Informasi Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Laporan             | 1      | 106.500.000    |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Layanan Keamanan Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            |                                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Telah Menggunakan Layanan<br>Keamanan Informasi                                               | Perangkat<br>Daerah | 15     | 295.464.000    |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Cimahi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023, terutama dalam rencana pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan asumsi penyediaan dana sesuai dengan yang diperkirakan. Rencana target kinerja dan anggaran belum mempertimbangkan aspek ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Cimahi, 2022  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA CIMAHI



**MOCHAMAD RONNY**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691015 199003 1 011

# CROSCUTTING SASARAN IKU



## SEKRETARIS

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

## KADISKOMINFO

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

## KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIKASI STATITIKA

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

## KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT

1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

